

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Depok: Prenamedia Group, 2018.

Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Bunga Rampai Komisi Yudisial : *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2018.

Dedi Ismatullah, Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Tata Negara : Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Erna Dewi, Firganefi , *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

\_\_\_\_\_, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

\_\_\_\_\_, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana & Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2016.

Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang  
Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang  
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang  
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun  
1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan  
Agama.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial  
RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan  
02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman  
Perilaku Hakim.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial  
RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012  
Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman  
Perilaku Hakim.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor  
03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 Tentang Tata  
Cara Pemeriksaan Bersama

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman  
Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*) di  
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1/Maklumat/KMA/IX/2017  
tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim.

### C. Karya Ilmiah

Harsyil Hertanto, 2014, "*Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 44 No. 1.

Heni Hendrawati dkk., 2016, "*Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Bermartabat dan Berintegritas*", Varia Justicia, Vol.12 No.1.

Kevin Angkouw, 2014, "*Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan*", Lex Administratum, Vol. 2 No. 2.

Muhammad Fauzan, 2014, "*Pasang Surut Hubungan Antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1.

Mohammad Yuhdi, 2011, "*Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Kelembagaan Antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung*", Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th.24, No. 1.

Watuseke Garry, 2017, "*Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman*", Lex Administratum, Vol. 5 No. 6.

Prim Fahrur Razi, 2007. Tesis : *Sengketa Kewenangan Pengawasan Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial*. Semarang: Universitas Diponegoro.

#### D. Website

*Harus Ada Perbaikan dalam Rekrutmen Hakim Ad Hoc*, tersedia di [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

*Hingga Agustus 2018 KPK OTT 19 Hakim, 10 diantaranya Hakim Ad Hoc*

*Tipikor*, tersedia di [www.hetanews.com](http://www.hetanews.com)

*ICW : Mayoritas Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Berkategori 'Merah'*, tersedia di [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)

*Idrus, Metode Penelitian Hukum*, tersedia di [www.academia.edu](http://www.academia.edu)

*Ketua MA Keluarkan Maklumat Pengawasan Aparatur Peradilan*, tersedia di [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

*KPK Tangkap Hakim Ad hoc, ICW Kritik Seleksi oleh Mahkamah Agung*, tersedia di [www.tempo.co](http://www.tempo.co)

*Mahkamah Agung Kesulitan Awasi Hakim di Luar Pengadilan*, tersedia di [www.nasional.tempo](http://www.nasional.tempo) diakses pada 25 Februari 2019

*Pengertian Hakim Karier, Non Karier, dan Hakim Ad Hoc*, tersedia di [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

*Sudah Ada Aturan Jelas, MA Bingung Masih Ada Hakim Terjaring OTT KPK,*  
tersedia di [www.kompas.com](http://www.kompas.com)

Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Agung, tersedia di  
[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

Zulkarnain, *Pergeseran Kekuasaan Kehakiman Peradilan Agama*, tersedia di.  
[www.pta-makassarkota.go.id](http://www.pta-makassarkota.go.id).

